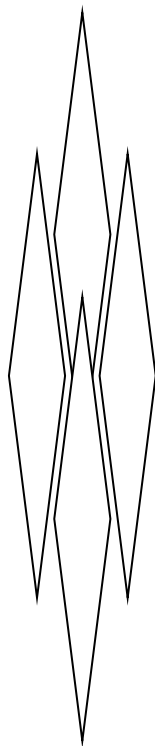


**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2022**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KAB.TAPANULI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmad dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 1 |
| C. Dasar Hukum..... | 2 |
| D. Bidang Kewenangan..... | 3 |
| E. Struktur Organisasi..... | 9 |
| F. Gambaran Umum | 10 |
| a. Sumber Daya Aparatur..... | 11 |
| b. Sarana dan Prasarana..... | 11 |
| c. Isu-Isu Strategis..... | 16 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 13 |
| A. Rencana Strategis dan Arah Kebijakan | 13 |
| B. Ringkasan Indikator Kinerja Utama | 14 |
| C. Rencana Kerja Tahunan (RKT)..... | 15 |
| D. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)..... | 15 |
| E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... | 16 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 17 |
| A. Pengukuran Kinerja..... | 17 |
| 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2022..... | 17 |
| 2. Membandingkan antara Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Capaian Kinerja Tahun 2021..... | 18 |
| 3. Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Capaian Kinerja Akhir Tahun 2022 dalam Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah..... | 18 |
| 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan..... | 18 |
| 5. Analisis Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.... | 22 |
| B. Akuntabilitas Keuangan..... | 22 |
| BAB IV PENUTUP..... | 25 |
| A. Kesimpulan..... | 25 |
| B. Saran..... | 25 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan entitas Akuntabilitas Kinerja berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdapat klausul yang menyebutkan bahwa menteri/pimpinan lembaga dapat memperluas praktek perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal dan menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan uraian di atas Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan diwajibkan mengkonsumsi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

Sedangkan Tujuan penyusunan adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi

yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 dengan memperhatikan pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standart Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 630);
15. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
16. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 697).
17. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 800/013/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Bidang Kewenangan

Uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 116 Tahun 2021 dengan uraian tugas pokok dan fungsi.

- **Tugas**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten.

- **Fungsi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- d) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- e) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- f) Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB.
- g) Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- h) Pelaksanaan pelayanan KB.
- i) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- k) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan
- l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang-bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kesekretariatan.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Menyenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Membina, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang terkait dengan Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam tugasnya;
7. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;
8. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
9. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Dinas;
10. Menyenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; Menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
12. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha.
- b) Koordinasi penyusunan perencanaan.
- c) Pengelolaan administrasi keuangan.
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- e) Pengelolaan administrasi perlengkapan
- f) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol.
- g) Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang.
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.
- i) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha.
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/asset.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta verifikasi, pembukuan dan pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- b. Membuat Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Kas Kegiatan di Lingkungan Dinas.
- e. Menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja dinas.
- f. Melaksanakan administrasi pemungutan, pemetaan dan pelaporan pajak-pajak.
- g. Melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan dinas.
- h. Melaksanakan akuntansi keuangan dinas.
- i. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup dinas.
- k. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dinas.
- l. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati.
- m. Mengkoordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHKIP, dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

III. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan Daaerah Kabupaten.

Dalam Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan kota

- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana
- 4) Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten dan kota
- 5) Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten /Kota
- 6) Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten /Kota
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana
- 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana
- 9) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
- 10) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana
- 11) Pelaksanaan administrasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

V. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita.

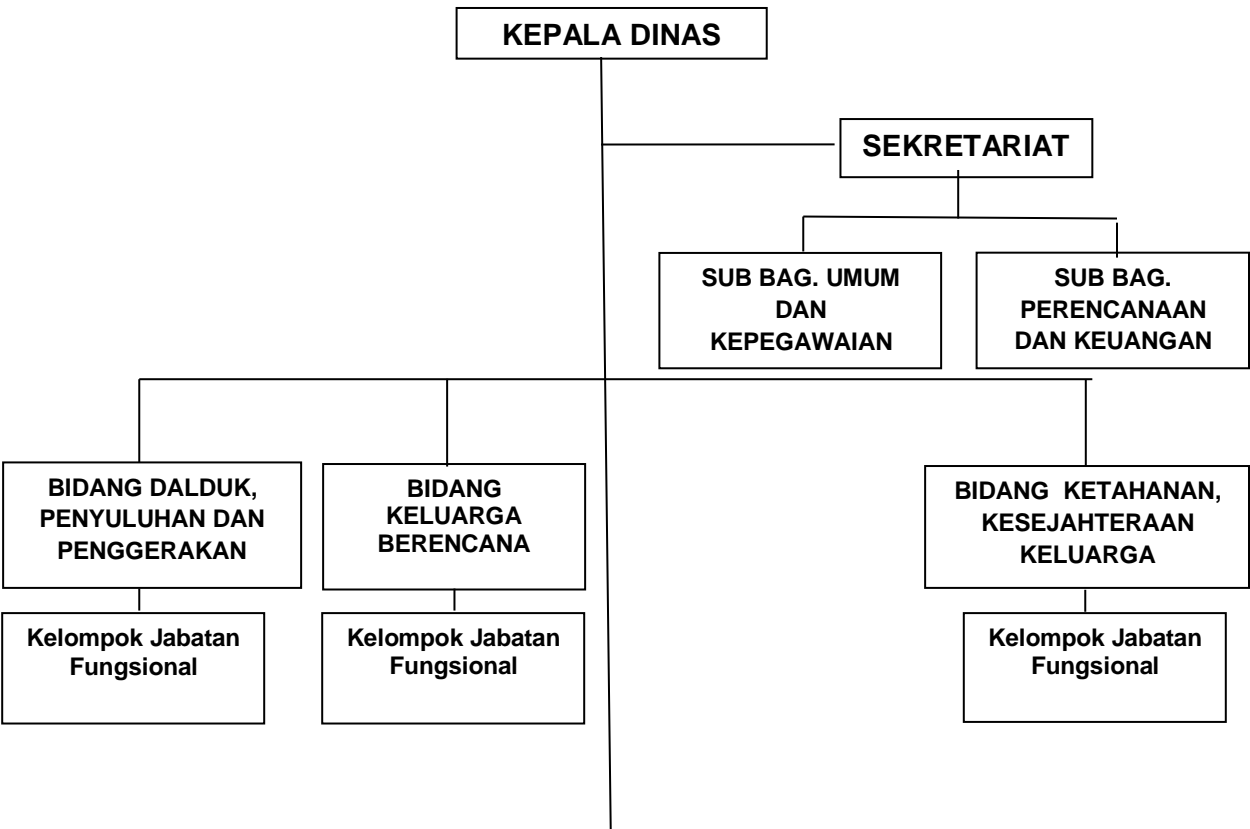
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan kerahanan remaja .
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- j. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- k. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

VI. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (a), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalam Bagan di bawah ini



UPTD

F. Gambaran Umum

1. Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlepas dari sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

Sumber daya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus memenuhi jumlah, mutu dan penyebaran petugas lapangan, disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kegiatan-kegiatan dalam sumber daya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berupa perencanaan, kebutuhan tenaga (petugas), peningkatan kemampuan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan tenaga Keluarga Berencana.

Sumber Daya Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Sebagai berikut :

| No. | Pegawai | L | P | JUMLAH |
|--------|---------------------------|----|----|--------|
| 1 | PNS | 10 | 28 | 38 |
| 2 | CPNS | - | - | - |
| 3 | Honor Daerah | - | 1 | 1 |
| 4 | Honor Provinsi (PLKB) | - | - | - |
| 5 | Tenaga Harian Lepas (THL) | 9 | 38 | 47 |
| Jumlah | | 19 | 67 | 86 |

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

| No. | Pendidikan | L | P | JUMLAH |
|--------|---|----|----|--------|
| 1 | Pasca Sarjana (S-2) | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Sarjana (S-1) | 1 | 33 | 25 |
| 3 | Sarjana Muda / D3 | 1 | 16 | 13 |
| 4 | D-1 / D-2 | - | - | - |
| 5 | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) | 3 | 12 | 15 |
| 6 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) | - | - | - |
| 7 | Sekolah Dasar (SD) | - | 1 | 1 |
| Jumlah | | 19 | 67 | 86 |

3. Berdasarkan Golongan

| No. | Golongan | L | P | JUMLAH |
|--------|--------------|----|----|--------|
| 1 | Golongan IV | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Golongan III | 7 | 21 | 28 |
| 3 | Golongan II | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Golongan I | - | - | - |
| Jumlah | | 10 | 28 | 38 |

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

| No. | Diklat | L | P | JUMLAH |
|-----|------------------------|---|---|--------|
| 1 | ADUMLA / DIKLAT PIM IV | - | - | - |
| 2 | SPAMA / DIKLAT PIM III | 1 | 1 | 2 |
| 3 | DIKLAT PIM II | 1 | - | 1 |

| | | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| Jumlah | 2 | 1 | 3 |
|---------------|----------|----------|----------|

5. Berdasarkan Eselon dan Non Eselon

| No. | Eselon | L | P | JLH | Non Eselon | L | P | JLH |
|---------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Eselon II | - | 1 | 1 | Pelaksana | 10 | 16 | 26 |
| 2 | Eselon III | 1 | 3 | 4 | Entry Data/Pengemudi | 5 | 19 | 24 |
| 3 | Eselon IV | 3 | 8 | 11 | Petugas Kebersihan | - | 1 | 1 |
| Jumlah | | 4 | 12 | 16 | Jumlah | 15 | 26 | 51 |

6. Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PPLKB)

| No. | Kecamatan | L | P | JUMLAH |
|---------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Batang Angkola | - | 1 | 1 |
| 2 | Sipirok | - | 2 | 2 |
| 3 | Sipirok Dolok Hole | - | 1 | 1 |
| 4 | Angkola Timur | - | 4 | 4 |
| 5 | Angkola Barat | - | 2 | 2 |
| 6 | Angkola Selatan | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Marancar | - | 1 | 1 |
| 8 | Batang Toru | - | 2 | 2 |
| 9 | Sayur Matinggi | 1 | - | 1 |
| 10 | Arse | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Muara Batang Toru | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Aek Bilah | - | - | - |
| 13 | Angkola Sangkunur | - | 1 | 1 |
| 14 | Tantom Angkola | - | 1 | 1 |
| 15 | Angkola Muaratais | - | 3 | 3 |
| Jumlah | | 4 | 21 | 25 |

2. Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

| No. | URAIAN | JUMLAH |
|---------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | Gedung Tempat Kerja | 16 Unit |
| 2 | Kendaraan Roda 4 | 7 Unit |
| 3 | Kendaraan Roda 2 | 74 Unit |
| 4 | Meja | 57 Buah |
| 5 | Kursi | 100 Buah |
| 6 | Laptop | 13 Unit |
| 7 | Personal Computer (PC) | 10 Unit |
| 8 | Proyektor | 15 Unit |
| 9 | Telephon Mobil (Smartphon) | 14 Unit |
| 10 | Smart TV | 4 Unit |
| Jumlah | | 307 Unit |

Sasaran hasil Program pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah meningkatnya kesadaran dan mutu sumber daya manusia serta perwujudan keluarga yang berkualitas.

3. Isu-Isu Strategis

Laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara dalam kurun waktu 2010 - 2020 masih tinggi yaitu mencapai 1,28 % sedangkan di Kabupaten Tapanuli Selatan selama periode 2010 – 2020 mencapai 0,45 %, kemudian pada tahun 2021 mencapai 0,67 % sedangkan pada tahun 2022 mencapai 0,21 % yang dikhawatirkan penduduk tersebut tidak berkualitas yang kebanyakan di daerah-

daerah miskin, terpencil, padat penduduk dan kampung-kampung nelayan yang jauh dari puskesmas atau klinik KB.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa salah satu yang menjadi faktor dominan penyebab Meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk yang kebanyakan di daerah-daerah miskin yang terpencil serta jauh dari puskesmas/klinik KB dan padat penduduk.

Permasalahan kependudukan di atas tentunya akan berdampak pada pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Beberapa permasalahan yang dapat terjadi dari aspek kuantitas penduduk berdampak pada pembangunan antara lain :

- a. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan produksi (pangan, sandang, papan).
- b. Pembangunan berpusat pada daerah padat penduduk sehingga terjadi kesenjangan sosial.
- c. Munculnya pemukiman kumuh, sehingga ada kesenjangan sosial antara kaya dan miskin
- d. Banyaknya pengangguran dan munculnya kriminal.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis dan Arah Kebijakan

1. Visi dan Misi

Mencermati visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap I Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025 yaitu : **“Tapanuli Selatan yang Maju, Adil berlandaskan Agama dan Adat Budaya”**.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

“Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”.

Untuk mendukung Visi Bupati Tapanuli Selatan dalam RPJMD yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya local yang produktif dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas social dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Maka dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk Misi ke-1 yaitu **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ)** juga mempunyai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan melalui Rencana Kerja (Renja).

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | |
|----|---|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ) | Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk | Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk | 1 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) |

Sasaran Strategis tersebut di atas akan dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudian dalam implementasinya upaya pencapaiannya dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalam penuangan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Arah kebijakan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Cakupan dan Pelayanan KB yang Merata dan Berkualitas.
2. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK.
3. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Remaja.
4. Peningkatan Pembangunan Keluarga.
5. Penguatan Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi.
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral

B. Ringkasan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi terhadap LAKIP Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | KET |
|----|--|------------------------------------|--------|--------|-----|
| 1 | Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk | 1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | % | 0,28 | |

C. Ringkasan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun Anggaran 2022 (diluar rutin) sebanyak 1 (satu) Program dan 3 (tiga) kegiatan (Daftar Terlampir)

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 1 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 1. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 2. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB b. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak |

D. Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun Anggaran 2021 sebanyak 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan pagu Rp. 12.039.130.485,- dan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) (Daftar Terlampir)

E. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada daftar di bawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA P.APBD
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2022**

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target |
|----|--|--|--------|
| 1. | Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (Persen) | 0,28 % |

| No | Program / Kegiatan | Anggaran | | Keterangan |
|----|---|----------------------|----------------------|------------|
| | | Awal | Perubahan | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.770.468.094,- | Rp. 5.818.374.485,- | P.APBD |
| 2. | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Rp. 6.220.706.400,- | Rp. 6.220.756.000,- | P. APBD |
| | Total | Rp. 10.991.174.494,- | Rp. 12.039.130.485,- | |

Pihak Kedua,

Sipirok,
Pihak Pertama,

2022

H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM

AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199602 1 003

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada Tahun 2022.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator “persentase laju pertumbuhan penduduk dan rata-rata jumlah anak per keluarga” menggunakan cara perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian, semakin baik kinerja yang dicapai.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisaasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

| NO | RENTANG CAPAIAN | KATEGORI CAPAIAN |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | 90 % ≤ 100 % | Sangat Tinggi |
| 2. | 76 % ≤ 90 % | Tinggi |
| 3. | 66 % ≤ 75 % | Sedang |
| 4. | 51 % ≤ 65 % | Rendah |
| 5. | ≤ 50 % | Sangat Rendah |

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2022 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2022

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--|-------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk | 1 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 0,28 | 0,49 | 57,14 |
| Rata-Rata Capaian | | | | | | 57,14 |

Sumber Data : Dinas Dukcapil Kab. Tapsel

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat Indikator Kinerja Utama mendukung sasaran strategis tersebut kurang dari target indikator kinerja sasaran, maka secara umum pencapaian sasaran adalah 57,14 persen dengan kategori Rendah.

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja Tahun 2021

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | REALISASI (%) | | CAPAIAN (%) | |
|--|-------------------|---------------------------|---------------|------|-------------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk | 1 | Laju Pertumbuhan Penduduk | 0,67 | 0,49 | 157,05 | 57,14 |
| Capaian | | | 0,67 | 0,49 | 157,05 | 57,14 |

Sumber Data : Dinas Dukcapil Kab. Tapsel

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra.

| SASARAN STRATEGIS | | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | Realisasi 2022 | Target 2026 |
|--|------|-------------|-------------------|---------------------------|--------|----------------|-------------|
| Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk | Laju | Pertumbuhan | 1 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 0,49 | 0,23 |
| Capaian | | | | | | 0,49 | 0,23 |

Jika melihat perbandingan Realiasi kinerja sampai dengan tahun 2022 yang terdapat dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan, maka secara umum indikator tersebut belum terealisasi melebihi target 2026.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian kinerja pada tahun 2022 ini, sasaran kinerja tidak dapat tercapai target hingga 100%, oleh karena itu implikasi pada predikat kinerja secara umum terkategori Rndah. Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Pengukuran Kinerja sasaran yaitu sebagai berikut :

| NO | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI (RUMUS) | CAPAIAN % |
|----|--|------------------------------|--------|---|-----------|
| 1 | Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk | 1. Laju Pertumbuhan Penduduk | 0,28 % | 0,49 (Jumlah Penduduk Tahun 2022) $\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{316.568}{315.021} \times 100 - 1 \times 100$ (Jumlah Penduduk Tahun 2021) | 57,14 |

Sumber Data : Dinas Dukcapil Kab. Tapsel

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Bila dilihat capaian kinerja pada indikator di atas, capaian kinerja mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2021, yaitu dari 0,67 persen pada tahun

2021 berhasil diturunkan menjadi 0,49 persen pada tahun 2022 atau mengalami penurunan sebesar 1,36 persen. Oleh karena itu Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan, artinya dalam penurunan laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dikarenakan kesertaan ber-KB di wilayah dan sasaran khusus (daerah tertinggal/perbatasan serta didukung potensi yang dapat dikembangkan melalui program/kegiatan di “Kampung KB” yaitu potensi utama yang dapat memperkuat implementasi program **Bangga Kencana** di lini lapangan.

Keberhasilan Laju Pertumbuhan Penduduk ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya.
- b. Adanya rapat evaluasi setiap triwulan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- c. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik dan sosial media terkait pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, Advokasi dan KIE serta Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) seperti di Kampung KB, Desa Binaan, Faskes-Faskes yang tersebar di seluruh kecamatan.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari PLKB/PKB Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan melalui kegiatan CSR bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mendukung beberapa pengembangan kampung KB.
- c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari BKKBN RI dan Dinas Kesehatan seperti kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan, Advokasi dan KIE serta Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) pada 15 kecamatan seperti di Kampung KB, Desa Binaan, RSUD Sipirok, Faskes-Faskes yang tersebar di seluruh Kecamatan, dll

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.039.130.485,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 11.286.671.401,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 93,75% yang diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Hasil yang dicapai adalah : Melakukan Sosialisasi, Advokasi dan KIE, Penyuluhan dan Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) pada 15 kecamatan seperti di Kampung KB, Desa Binaan, Puskesmas, Posyandu, RSUD Sipirok, dll.



Penyuluhan dan Pelayanan TNI-
Bangga Kencan- Kes



Saat Pelayanan Kontrasepsi Mantap
(MOW/MOP)



Saat Pelayanan Kontrasepsi Mantap
(MOW/MOP)



Saat Pelayanan Kontrasepsi Mantap
(MOW/MOP)



Penyuluhan dan Pelayanan Bhakti
Sosial IBI-Bangga Kencan- Kes



Saat Pelayanan Kontrasepsi Mantap
(MOW/MOP)

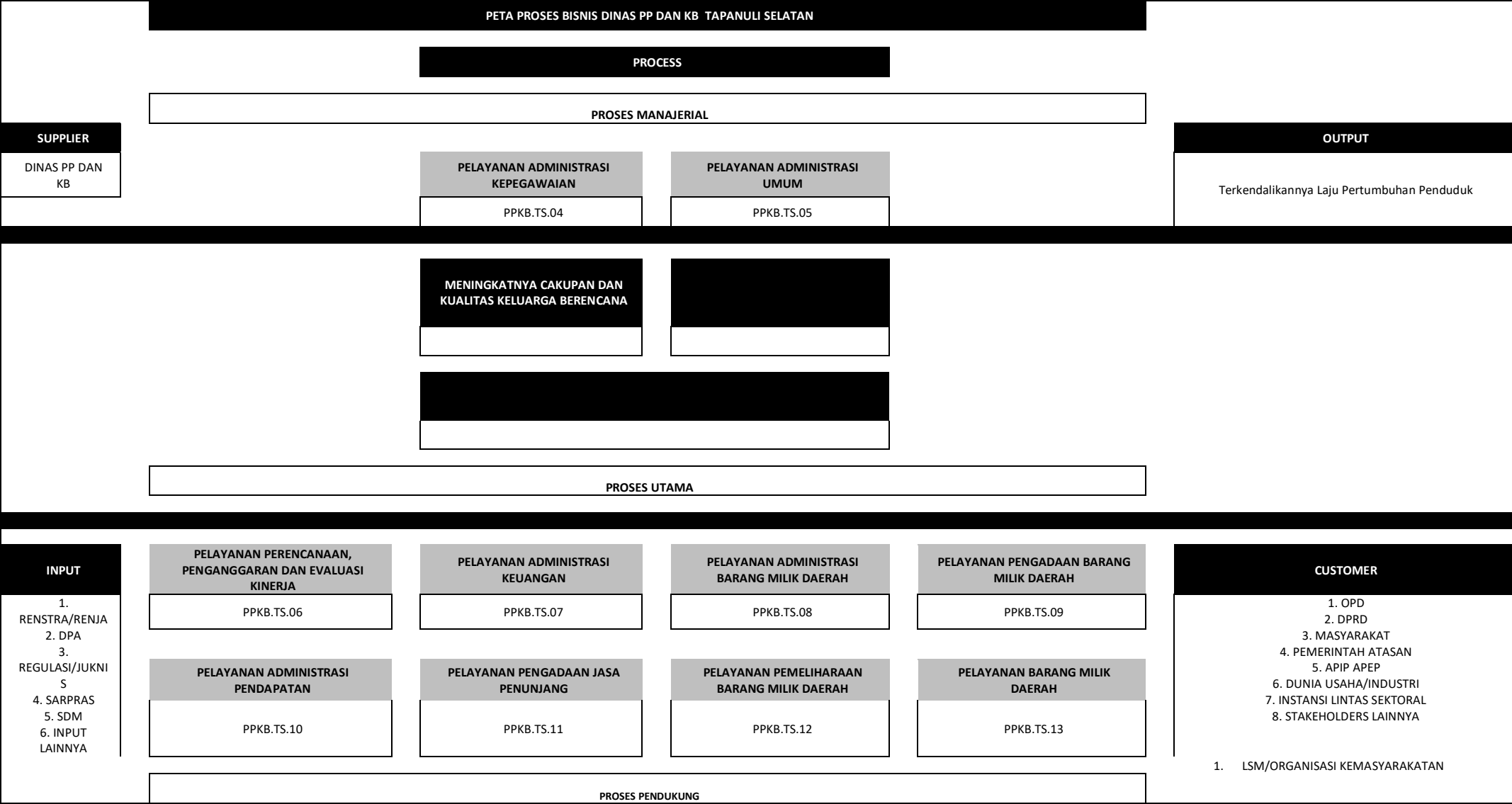


Saat Pelayanan Kontrasepsi Mantap
(MOW/MOP)



Saat Pelayanan Implan dan IUD Bhakti
Sosial IBI-Bangga Kencan- Kes

Peta Proses Bisnis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan



5. Analisis Program dan Kegiatan Tahun 2022

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Efisiensi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 11.286.671.401,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 12.039.130.485. dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 6,61 %. Persentase efisiensi ini secara teori adalah kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun kalau dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Seperti pada kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang persentase efisiensinya mencapai 8,30 %, hal ini dikarenakan adanya beberapa menu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

5.1. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 1 program dan 3 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini :

❖ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.039.130.485,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 11.286.671.401,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 93,75 % yang diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana. Hasil yang dicapai adalah : Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) pada 15 kecamatan seperti di Kampung KB, Desa Binaan, Puskesmas, Posyandu, RSUD Sapiro, dll.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.039.130.485,- anggaran

tersebut terdiri atas belanja tidak langsung dan sebesar Rp. 3.821.257.968,- dan belanja langsung sebesar 8.217.872.517,- untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :

| NO | URAIAN | ANGGARAN BELANJA Rp. | RELAISASI BELANJA Rp. | % |
|----|--|----------------------|-----------------------|--------|
| | | 2022 | 2022 | 2022 |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.818.374.485 | 4.434.104.354 | 92,53 |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 3.821.257.968 | 3.612.323.265 | 95,85 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 53.000.000 | 53.000.000 | 100,00 |
| | Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 22.245.600 | 22.165.600 | 99,64 |
| | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 10.151.500 | 10.095.500 | 99,45 |
| 2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 74.423.600 | 74.423.600 | 100,00 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 25.000.000 | 24.000.000 | 96,00 |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 288.418.400 | 282.954.400 | 98,11 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 135.000.000 | 134.874.000 | 99,91 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 5.000.000 | 4.920.000 | 98,40 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | 310.698.000 | 309.894.619 | 99,74 |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 850.000 | 750.000 | 88,24 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | 28.900.287 | 23.195.629 | 80,26 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 977.509.130 | 959.947.748 | 98,20 |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | 62.920.000 | 61.413.956 | 97,61 |
| B | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 5.711.766.000 | 5.149.076.250 | 91,78 |
| 1 | PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) | | | |
| | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 6.160.706.000 | 5.619.670.984 | 91,70 |
| 2 | PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 |
| | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 30.050.000 | 30.042.100 | 99,97 |
| | Total | 12.039.130.485 | 11.286.671.401 | 93,75 |

Adapun untuk anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dari Tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan begitu juga perhatian pemerintah terhadap urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini memiliki arti penting dikarenakan tekanan terhadap program Bangga Kencana akan semakin besar setiap tahunnya, sehingga bila tidak diikuti dengan peningkatan program Bangga Kencana maka laju pertumbuhan penduduk akan semakin menurun nantinya. Peningkatan program itu tentunya dapat dicapai bila didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Namun secara umum alokasi belanja langsung untuk kegiatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2021.

Jumlah anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022

| NO | TAHUN | BELANJA TIDAK LANGSUNG | BELANJA LANGSUNG | JUMLAH |
|----|-------|------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2017 | 3.619.605.961 | 4.346.115.600 | 7.965.721.561 |
| 2 | 2018 | 2.553.242.963 | 2.626.008.925 | 9.246.762.963 |
| 3 | 2019 | 4.438.952.231 | 8.604.694.080 | 13.043.646.311 |
| 4 | 2020 | 3.382.670.054 | 7.055.033.000 | 10.437.703.054 |

| | | | | |
|---|------|---------------|---------------|----------------|
| 5 | 2021 | 3.637.449.517 | 6.866.534.000 | 10.503.983.517 |
| 6 | 2022 | 3.821.257.968 | 8.217.872.517 | 12.039.130.485 |

Sementara untuk realisasi penyerapan anggaran sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini :

| NO | TAHUN | TARGET | | REALISASI | | % | SISA ANGGARAN |
|----|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|
| | | TIDAK LANGSUNG | LANGSUNG | TIDAK LANGSUNG | LANGSUNG | | |
| 1 | 2017 | 3.619.605.961 | 4.346.115.600 | 3.420.289.440 | 4.244.303.719 | 97,66 | 101.811.881 |
| 2 | 2018 | 2.553.242.963 | 6.693.520.000 | 2.626.008.925 | 6.576.905.215 | 98,26 | 116.614.785 |
| 3 | 2019 | 4.438.952.231 | 8.604.694.080 | 3.310.951.918 | 7.678.579.479 | 89,24 | 926.114.601 |
| 4 | 2020 | 3.382.670.054 | 7.055.033.000 | 3.293.008.506 | 5.194.461.884 | 81,32 | 1.950.232.664 |
| 5 | 2021 | 3.637.449.517 | 6.866.534.000 | 3.345.940.263 | 6.237.240.341 | 91,23 | 920.802.913 |
| 6 | 2022 | 3.821.257.968 | 8.217.872.517 | 3.612.323.265 | 7.674.348.136 | 93,75 | 752.459.084 |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase penyerapan anggaran dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dalam dua tahun terakhir kecenderungannya mengalami peningkatan. Meskipun realisasi secara umum masih berada pada 92,49 %. Walaupun untuk sisa anggaran (silpa) masih terdapat penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terlambatnya juknis pada kegiatan operasional penyuluhan keluarga berencana (BOKB) dan adanya beberapa menu kegiatan yang tidak terlaksana.

Adapun pencapaian Kinerja dan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir di bawah ini :

| No | Sasaran Strategi | IKU | Target | Kinerja | | Pagu | Anggaran | | Tingkat Efesiensi |
|----|--|------------------------------|--------|------------|-------|----------------|----------------|-------|-------------------|
| | | | | Realisaasi | % | | Realisasi | % | |
| 1 | Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk | 1. Laju Pertumbuhan Penduduk | 0,28 | 0,49 | 57,14 | 12.039.130.485 | 11.286.671.401 | 93,75 | 6,25 |
| | | Capaian | | | 57,14 | | | | |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berawal dari Visi dan Misi, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan serta kebijakan dan Program kegiatan dan juga pelaksanaan Program/kegiatan, maka dari hasil evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 pada indikator mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu dari rata-rata capaian kinerja 157,05 persen pada tahun 2021 meningkat menjadi capaian kinerja 57,14 persen pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 99,91 persen.
2. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari BKKBN RI dan Dinas Kesehatan seperti kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan, Advokasi dan KIE serta Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) pada 15 kecamatan seperti di Kampung KB, Desa Binaan, RSUD Sipirok, Faskes-Faskes yang tersebar di seluruh Kecamatan.
3. Program/Kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun Anggaran 2022 sebanyak 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) kegiatan yang mana program/kegiatan tersebut tingkat capaiannya adalah 93,75 %.

B. Saran

Dalam rangka Peningkatan Kinerja yang Akuntabel pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan maka perlu saran sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yang pendanaannya ditampung dalam APBD Kabupaten Tapanuli Selatan perlu ditingkatkan dalam rangka memberhasilkan Program Bangga Kencana sebagai dana Sharing kegiatan yang dibiayai APBN.
2. Perlu penambahan personil, Peningkatan Insentif Kader dan Petugas KB serta peningkatan status Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan karena luasnya jangkauan wilayah Pembinaan.
3. Perlu peningkatan Kualitas Perencanaan Program agar Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang diprogramkan sebelumnya.
4. Perlu adanya peningkatan kerjasama antar stakeholder/mitra kerja dalam peningkatan program Bangga Kencana.

5. Perlu Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan bagi Kader dan Petugas KB dalam Peningkatan kualitas data, Pencatatan dan Pelaporan serta Pelayanan KB.

Sipirok, 4 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KAB. TAPANULI SELATAN,**



**AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740205 199602 1 003**

**RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

| No | Kode | | | | | Program | Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Target Kinerja | Rencana Anggaran (Rp) | Sumber Dana |
|----|------|----|----|------|-----|--|---|-------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 14 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | 1 | 14 | 01 | 2.02 | | | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | | | |
| | 1 | 14 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Kab. Tapsel | 100% | 3,821,258,031 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.02 | 02 | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Tapsel | 2 Kali | 53,000,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.02 | 06 | | Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kab. Tapsel | 6 Dok | 22,245,600 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.02 | 07 | | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab. Tapsel | 2 Lap | 10,151,500 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.05 | | | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | | | | |
| | 1 | 14 | 01 | 2.05 | 02 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Tapsel | 67 Stel | 74,423,600 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.05 | 011 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Tapsel | 5 Orang | 25,000,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.06 | | | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | | |
| | 1 | 14 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Tapsel | 26 Unit | 288,418,400 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Tapsel | 12 Bulan | 3,000,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Tapsel | 12 Bulan | 135,000,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.06 | 06 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Tapsel | 12 Bulan | 5,000,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Kab. Tapsel | 510 OH | 310,698,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.08 | | | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | |
| | 1 | 14 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 85 Lbr | 850,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Kab. Tapsel | 12 Bln | 28,900,287 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Tapsel | 100% | 977,509,130 | DAU |

| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----|----|------|----|--|---|-------------|----------|-----------------------|---------|
| | 1 | 14 | 01 | 2.09 | | | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | |
| | 1 | 14 | 01 | 2.09 | 02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | Kab. Tapsel | 7 Unit | 62,920,000 | DAU |
| 2 | 1 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | 1 | 14 | 03 | 2.02 | | | PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) | | | | |
| | 1 | 14 | 03 | 2.02 | 02 | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Kab. Tapsel | 25 Org | 6,160,706,000 | DAU/DAK |
| | 1 | 14 | 03 | 2.03 | | | PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | 1 | 14 | 03 | 2.03 | 05 | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Kab. Tapsel | 3000 Org | 30,000,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 03 | 2.03 | 11 | | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Kab. Tapsel | 3000 Org | 30,050,000 | DAU |
| | | | | | | J U M L A H | | | | 12,039,130,548 | |

RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)
TAHUN 2022

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | | Target Kinerja | Rencana Anggaran (Rp) | Sumber Dana |
|----|--|-------------------|--|----------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | I | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | | |
| | | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 100% | 3,821,258,031 | DAU |
| | | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Kali | 53,000,000 | DAU |
| | | 3 | Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 6 Dok | 22,245,600 | DAU |
| | | 4 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan | 2 Lap | 10,151,500 | DAU |
| | | II | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | | | |
| | | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 67 Stel | 74,423,600 | DAU |
| | | 2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 Orang | 25,000,000 | DAU |
| | | III | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | |
| | | 1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26 Unit | 288,418,400 | DAU |
| | | 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12 Bulan | 3,000,000 | DAU |
| | | 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 Bulan | 135,000,000 | DAU |
| | | 4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12 Bulan | 5,000,000 | DAU |
| | | 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | 510 OH | 310,698,000 | DAU |
| | | IV | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | |
| | | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 85 Lbr | 850,000 | DAU |
| | | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | 12 Bln | 28,900,287 | DAU |
| | | 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100% | 977,509,130 | DAU |
| | | V | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | |
| | | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau | 7 Unit | 62,920,000 | DAU |
| 2 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | |
| | | VI | PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) | | | |
| | | 1 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 25 Org | 6,160,706,000 | DAU/DAK |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--------------------|--|----------|-----------------------|-----|
| | | VII | PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | 1 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 3000 Org | 30,000,000 | DAU |
| | | 2 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 3000 Org | 30,050,000 | DAU |
| | | J U M L A H | | | 12,039,130,548 | |

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

TAHUN 2022

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

| No | Kode | | | | | Program | Lokasi | Target Kinerja | Rencana Anggaran (Rp) | Sumber Dana |
|----------|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|-------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 14 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | 1 | 14 | 01 | 2.02 | | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | | | |
| | 1 | 14 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Kab. Tapsel | 100% | 3,821,258,031 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Tapsel | 12 Bulan | 53,000,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kab. Tapsel | 6 Dok | 22,245,600 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab. Tapsel | 2 Lap | 10,151,500 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.05 | | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT | | | | |
| | 1 | 14 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Tapsel | 67 Stel | 74,423,600 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Tapsel | 5 Orang | 25,000,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.06 | | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | | |
| | 1 | 14 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Tapsel | 26 Unit | 288,418,400 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Tapsel | 12 Bulan | 3,000,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Tapsel | 12 Bulan | 135,000,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Tapsel | 12 Bulan | 5,000,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Kab. Tapsel | 510 OH | 310,698,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.08 | | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | |
| | 1 | 14 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Tapsel | 85 Lbr | 850,000 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Kab. Tapsel | 12 Bln | 28,900,287 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Tapsel | 100% | 977,509,130 | DAU |
| | 1 | 14 | 01 | 2.09 | | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | |
| | 1 | 14 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Kab. Tapsel | 7 Unit | 62,920,000 | DAU |
| 2 | 1 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | |
| | 1 | 14 | 03 | 2.02 | | PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) | | | | |
| | 1 | 14 | 03 | 2.02 | 02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Kab. Tapsel | 25 Org | 6,160,706,000 | DAU/DAK |
| | 1 | 14 | 03 | 2.03 | | PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | 1 | 14 | 03 | 2.03 | 05 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Kab. Tapsel | 3000 Org | 30,000,000 | |
| | 1 | 14 | 03 | 2.03 | 11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Kab. Tapsel | 3000 Org | 30,050,000 | DAU |
| | | | | | | J U M L A H | | | 12,039,130,548 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
TAHUN 2022**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

| NO | Indikator Sasaran | Target Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | Realisasi Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | % Capaian Dari Target | Ket |
|----|---|---|--|--------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 100.00 | 94.53 | 94.53 | |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3 | Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 100.00 | 99.64 | 99.64 | |
| 4 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | 100.00 | 99.45 | 99.45 | |
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan | 100.00 | 96.00 | 96.00 | |
| 7 | Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor | 100.00 | 98.11 | 98.11 | |
| 8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100.00 | 99.91 | 99.91 | |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 100.00 | 98.40 | 98.40 | |
| 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | 100.00 | 99.74 | 99.74 | |
| 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100.00 | 88.24 | 88.24 | |
| 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | 100.00 | 80.26 | 80.26 | |
| 14 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100.00 | 98.20 | 98.20 | |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | 100.00 | 97.61 | 97.61 | |
| 16 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 100.00 | 91.70 | 91.70 | |
| 17 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 18 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 100.00 | 99.97 | 99.97 | |

**PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
TAHUN 2022**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

| NO | Indikator Sasaran | Realisasi Kinerja Tahun 2021 (%) | Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) | Realisasi Kinerja Tahun 2022 (%) | Capaian Kinerja Tahun 2022 (%) | Ket |
|----|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 91.99 | 91.99 | 94.53 | 94.53 | |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3 | Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 99.22 | 99.22 | 99.64 | 99.64 | |
| 4 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | 97.82 | 97.82 | 99.45 | 99.45 | |
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100.00 | 100.00 | 96.00 | 96.00 | |
| 7 | Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor | - | - | 98.11 | 98.11 | |
| 8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 99.67 | 99.67 | 99.91 | 99.91 | |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | 98.40 | 98.40 | |
| 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | 99.83 | 99.83 | 99.74 | 99.74 | |
| 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100.00 | 100.00 | 88.24 | 88.24 | |
| 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | 90.47 | 90.47 | 80.26 | 80.26 | |
| 14 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 91.54 | 91.54 | 98.20 | 98.20 | |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | 99.98 | 99.98 | 97.61 | 97.61 | |
| 16 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 90.08 | 90.08 | 91.70 | 91.70 | |
| 17 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 99.53 | 99.53 | 100.00 | 100.00 | |
| 18 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 99.73 | 99.73 | 99.97 | 99.97 | |

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET CAPAIAN
KINERJA AKHIR TAHUN 2022 DALAM DOKUMEN RENCANA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

| NO | Indikator Sasaran | Realisasi Kinerja Tahun 2021 (%) | Capaian Kinerja Tahun 2021 (%) | Realisasi Kinerja Tahun 2022 (%) | Capaian Kinerja Tahun 2022 (%) | Target RKPD (%) |
|----|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 91.99 | 91.99 | 94.53 | 94.53 | 100.00 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 99.22 | 99.22 | 99.64 | 99.64 | 100.00 |
| 4 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | 97.82 | 97.82 | 99.45 | 99.45 | 100.00 |
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100.00 | 100.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00 |
| 7 | Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor | - | - | 98.11 | 98.11 | 100.00 |
| 8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 99.67 | 99.67 | 99.91 | 99.91 | 100.00 |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | 98.40 | 98.40 | 100.00 |
| 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | 99.83 | 99.83 | 99.74 | 99.74 | 100.00 |
| 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100.00 | 100.00 | 88.24 | 88.24 | 100.00 |
| 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | 90.47 | 90.47 | 80.26 | 80.26 | 100.00 |
| 14 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 91.54 | 91.54 | 98.20 | 98.20 | 100.00 |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | 99.98 | 99.98 | 97.61 | 97.61 | 100.00 |
| 16 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 90.08 | 90.08 | 91.70 | 91.70 | 100.00 |
| 17 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 99.53 | 99.53 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 18 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 99.73 | 99.73 | 99.97 | 99.97 | 100.00 |

**REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2022**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

| NO | Sasaran Strategis | SKPD yang yang Melaksanakan Program/Kegiatan | Target Anggaran Tahun 2022 (Rp) | Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp) | Ket |
|---------------|---|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Dinas Dalduk dan KB | 3,821,257,968 | 3,612,323,265 | 94.53 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Dalduk dan KB | 53,000,000 | 53,000,000 | 100.00 |
| 3 | Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Dinas Dalduk dan KB | 22,245,600 | 22,165,600 | 99.64 |
| 4 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dinas Dalduk dan KB | 10,151,500 | 10,095,500 | 99.45 |
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Dalduk dan KB | 74,423,600 | 74,423,600 | 100.00 |
| 6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Dalduk dan KB | 25,000,000 | 24,000,000 | 96.00 |
| 7 | Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor | Dinas Dalduk dan KB | 288,418,400 | 282,954,400 | 98.11 |
| 8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dinas Dalduk dan KB | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 |
| 9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinas Dalduk dan KB | 135,000,000 | 134,874,000 | 99.91 |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Dalduk dan KB | 5,000,000 | 4,920,000 | 98.40 |
| 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Dinas Dalduk dan KB | 310,698,000 | 309,894,619 | 99.74 |
| 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Dalduk dan KB | 850,000 | 750,000 | 88.24 |
| 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Dinas Dalduk dan KB | 28,900,287 | 23,195,629 | 80.26 |
| 14 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas Dalduk dan KB | 977,509,130 | 959,947,748 | 98.20 |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | Dinas Dalduk dan KB | 62,920,000 | 61,413,956 | 97.61 |
| 16 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Dinas Dalduk dan KB | 6,160,706,000 | 5,649,670,984 | 91.70 |
| 17 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Dinas Dalduk dan KB | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.00 |
| 18 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Dinas Dalduk dan KB | 30,050,000 | 30,042,100 | 99.97 |
| JUMLAH | | | 12,039,130,485 | 11,286,671,401 | 93.75 |